

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPK pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

### *Factors that affect the accuracy of submitting SKPK Treasurer Accountability Reports to the Aceh Tamiang Regency Government*

Eka Nurmalaa<sup>1\*</sup>, Sultan<sup>2</sup>, T. M. Jamil<sup>3</sup>, Mahbub Arfah<sup>4</sup>, Yohan Wibisono<sup>5</sup>

<sup>1,2,4</sup> Politeknik Pelayaran Malahayati, Aceh

<sup>3</sup> Universitas Syiah Kuala, Aceh

<sup>5</sup> Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang, Sumatera Selatan

#### Article Info

##### Article history:

Received Jan 05, 2024

Revised Jul 03, 2024

Accepted Jul 17, 2024

##### Kata Kunci:

Laporan Keuangan, Bendahara, Pemerintah Daerah.

##### Keywords:

Financial Statements, Treasurer, Regency Government.

#### ABSTRAK

Penerapan standar pada akuntansi di negara dalam pengelolaan bagian keuangan di daerah berdampak pada laporan tanggung jawab pelaksanaan anggaran di daerah (APBD). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan menggambarkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Sementara itu, faktor SDM, sarana serta prasarana bendahara, masa jabatan bendahara, peraturan, intensitas pelatihan manajemen serta akuntabilitas bendahara SKPD, serta ketidakjelasan peran di pemerintahan kabupaten Aceh Tamiang mempunyai pengaruh yang besar. Dampak ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban laporan pemerintah daerah. Dalam beberapa kasus, variabel intensitas pelatihan administrasi dan tanggung jawab akuntan SKPD ( $X_5$ ), serta ambiguitas dari peran ( $X_6$ ) menghasilkan dampak yang positif pada ketepatan waktu pelaporan pemerintahan di daerah.

#### ABSTRACT

The application of accounting standards in the country in the management of regional finance has an impact on regional budget implementation responsibility reports (APBD). This type of research is quantitative descriptive and describes the relationship between independent and dependent variables. Meanwhile, human resource factors, treasurer facilities, and infrastructure, treasurer's term of office, regulations, the intensity of management training, and accountability of SKPD treasurers, as well as unclear roles in the Aceh Tamiang district government have a big influence—the impact of the timeliness of submitting regional government accountability reports. In several cases, the variable intensity of administrative training and responsibilities of SKPD accountants ( $X_5$ ), as well as the ambiguity of the role ( $X_6$ ) produced a positive impact on the timeliness of government reporting in the regions.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



#### Corresponding Author\*:

Name: Eka Nurmalaa

Institution: Politeknik Pelayaran Malahayati, Jl. Laksamana Malahayati KM. 19 No. 12, Desa Durung, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia – 23381

Email: [ekanurmalaa28@gmail.com](mailto:ekanurmalaa28@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Penerapan standar pada akuntansi di negara dalam pengelolaan bagian keuangan di daerah berdampak pada laporan tanggung jawab pelaksanaan anggaran di daerah (APBD). Dalam APBD, akhir tahun sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002. Laporan pertanggungjawaban hanya terdiri dari pelaporan perhitungan APBD, memo perhitungan APBD, pelaporan arus kas, serta neraca. Dalam Permendagri 21/2011, pemerintah daerah akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari APBD dalam bentuk pelaporan keuangan yang diantaranya terdiri dari pelaporan pelaksanaan APBD, neraca di daerah, pelaporan arus kas, dan juga catatan dari pelaporan keuangan SAP.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Imbing, 2024). Melalui APBD arah, tujuan, serta prioritas pembangunan daerah yang akan dan sedang dikerjakan dapat diketahui (Sitorus, 2024).

Selain itu, lahirnya Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri 21/2011 yang merupakan versi revisi dari Permendagri 13/2006 telah melihat perbedaan dalam sistem pengelolaan bagian keuangan menjadi lebih transparansi melalui penerapan pada standar pengadministrasian akuntansi di pemerintah. Perubahan itu ditimbulkan oleh Permendagri 21/2011 antara lain adalah desentralisasi pada sistem administrasi akuntansi serta keuangan, yang peran dan tanggung jawabnya ditetapkan melalui peraturan tersebut. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola keuangannya sendiri. Hal ini berbeda dengan praktik pengelolaan keuangan sebelumnya, dimana pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan terpusat pada Departemen Keuangan Daerah/Badan Pengelola Keuangan berdasarkan Keputusan

Menteri Dalam Negeri 29/2002. Pelimpahan peran serta dan pertanggungjawaban lebih pada SKPD tercermin dalam sistem pencairan dan pencairan dana, penegasan tanggung jawab belanja, dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pihak yang mempunyai wewenang dalam penatausahaan pengelolaan keuangan berperan penting dalam memaksimalkan potensi terarahnya penggunaan anggaran (Damayanti, 2023). Dalam struktur Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja (Siagian, 2023). SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang (Rambe, 2023).

Selain itu, tergantung pada status dan wewenangnya, warga negara boleh gunakan pelaporan keuangan pemerintahan jika ingin lakukan pemantauan yang luas. Oleh karena itu, lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dan penegakannya bisa dilaksanakan untuk negosiasi anggaran serta tuntutan akuntabilitas pemerintahan. Dewan pada perwakilan regionalpun juga bisa melaksanakan pemantauan sesuai dengan kewenangan. Masyarakat bisa mempunyai kendali yang luas dan hingga akhirnya menggunakan haknya memilih dalam pemilihan umum.

Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari kinerja manajerial yang mendukung pelaksanaan pemerintahan yang demokratis sehingga masyarakat yakin terhadap hasil kerja aparatur yang telah dilaksanakan, bahwa setiap kinerja manajerial yang mencerminkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat (Mahestu, 2023). Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baik dapat dilihat dalam laporan keuangan yang dihasilkan (Barus, 2023).

Auditor pada bagian ini kantor yang memeriksa keuangan menggunakan pelaporan keuangan untuk dilakukan audit atau representasi wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Audit atas dasar laporan dari pemerintah bisa menjadi dasar pada audit lain atas pengelolaan bagian keuangan pemerintah, seperti audit kinerja serta audit tujuan khusus. Laporan-laporan pada keuangan suatu pemerintahan bisa dimanfaatkan oleh kreditor dalam memberikan nilai kredibilitas pada pemerintahan di pengelolaan utang. Prihal itu erat kaitannya kepada pemberian pinjaman kredit pada negara. Penelitian Rahman (2012) dengan menggunakan variabel kemampuan, pelatihan, sistem akuntansi pemerintahan dan kualitas pertanggungjawaban pelaporan keuangan menemukan bahwa kemampuan, pelatihan, sistem akuntansi pemerintahan dan kualitas dalam tanggung jawab pelaporan keuangan pusat di satuan unit kerja pemerintahan Aceh dinyatakan bahwa kualitas produk terpengaruh pada saat yang sama.

Berdasarkan temuan Nilawati (2009), ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Hal tersebut adalah SDM bendahara, sarana serta prasarana, jam kerja dari bendahara, dan juga intensitas mengikuti pelatihan. Variabel inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan pengujian ulang terhadap akuntan yang kerja di beberapa kantor kabupaten yang pemekaran di SUMUT (Sumatera Utara) selama kurun waktu 2007-2012 yang laporan keuangan daerahnya tidak diperoleh opini dari BPK RI karena opini yang tidak beralasan.

Putra (2012) meneliti pengaruh pengalaman kerja, motivasi kerja, dan intensitas pelatihan terhadap kualitas pelaporan keuangan satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Malang dengan menggunakan variabel pengalaman kerja, motivasi kerja, dan intensitas pelatihan. Variabel terikatnya adalah kualitas pelaporan keuangan, dan kami menyimpulkan bahwa variabel pengalaman kerja, motivasi kerja,

dan intensitas pelatihan terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Penelitian bertajuk “Evaluasi Program Belanja Pegawai Kementerian Keuangan dan Diklat Akuntan Berdasarkan Faktor Input, Proses, Output, dan Outcome” yang dilaksanakan oleh Bandiyono (2012) dan evaluasi pelatihan independen mengungkapkan bahwa tidak ada standarisasi dalam pelaksanaannya. menyimpulkan bahwa Hal ini diperlukan untuk mempersiapkan standarisasi penyelenggaraan pelatihan ini. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan suatu pelatihan dapat berupa faktor masukan, faktor proses, faktor keluaran, dan faktor hasil. Namun unsur input merupakan unsur yang paling penting dan menentukan dalam melakukan pelatihan.

Kolaborasi antara berbagai SKPD dalam lingkungan pemerintahan dapat menghasilkan sinergi yang bermanfaat (Siregar, 2023). SKPD merupakan pembantu Bupati dalam menyelenggarakan sistem pemerintahannya di daerah (Arifiansa, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini menguji keakuratan penyampaian laporan tahunan oleh tenaga akuntansi SKPD, dimana kewajiban penyampaian laporan tahunan oleh SKPD adalah dua bulan setelah akhir tahun anggaran berdasarkan peraturan yang ada.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan menggambarkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Populasi penelitian ini meliputi seluruh akuntan pendapatan dan belanja di Pemerintah Provinsi Aceh Tamiang. Sampel penelitian berjumlah 67 orang dan proses pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive random sampling* dari 46 SKPK Pemkab Aceh Tamiang.

Teknik pengumpulan data yaitu observasi langsung yang dilakukan untuk

mengamati berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi serta wawancara mendalam yang dilakukan untuk mendapat data informasi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi (Siregar, 2022).

Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari para responden di lapangan. Kuesioner terbagi dalam 2 bagian. Bagian kesatu berisi serangkaian pertanyaan yang umum, yaitu bagian demografi responden. Kemudian bagian yang kedua berisi serangkaian pernyataan mengenai sumber daya manusia, infrastruktur, senioritas, regulasi, intensitas pelatihan manajemen, dan ambiguitas peran. Teknik analisis data melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Hartati, 2021).

Pernyataan diukur dengan menggunakan skala Likert. Dengan menggunakan skala Likert, responden menjawab setiap pertanyaan dengan lima tingkat persetujuan: "sangat tidak setuju", "tidak setuju", "netral", "setuju", dan "sangat setuju". Anda akan diminta untuk melakukannya. Model analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda (*multiple regression analysis*).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah personil yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan di SKPK yang terdiri dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang berjumlah 71 (empat puluh enam) orang. Pada penelitian ini disebarkan 71 eksemplar kuesioner pada 71 orang responden, 67 eksemplar kembali sedangkan 4 eksemplar tidak kembali. Kuesioner yang kembali dijadikan sampel penelitian. Kuesioner yang kembali dijadikan sampel penelitian.

Tabel 1. Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang dikirim	71 Eks
Kuesioner yang tidak kembali	4 Eks
Kuesioner yang kembali	67 Eks
Kuisisioner yang dapat digunakan dalam penelitian	67 Eks

Sumber: Data Pribadi

Hasil penelitian berdasarkan jenis kelamin (Tabel 2) menunjukkan bahwa pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan paling banyak berjenis kelamin perempuan 43 orang (60,5%) dan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 28 orang (39,5%). Responden yang mengembalikan kuesioner berjumlah 67 responden yang terdiri dari 39 orang (58%) berjenis kelamin perempuan dan 28 orang (42%) berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen
Laki-laki	28 orang	42%
Perempuan	39 orang	58%
Jumlah	67 orang	100%

Sumber: Data Diolah

Hasil penelitian berdasarkan umur (Tabel 3) menunjukkan bahwa bendahara SKPK berumur di atas 40 tahun sejumlah 16 orang (24%) dan di bawah 40 tahun 51 orang (76%), dan secara tabel dapat di klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur	Frekuensi	Persen
di bawah 40 tahun	51 orang	76 %
di atas 40 tahun	16 orang	24%
Jumlah	67 orang	100%

Sumber: Data Diolah

Hasil penelitian berdasarkan masa kerja (Tabel 4) menunjukkan bahwa masa kerja bendahara SKPK beragam dengan komposisi terbanyak 1-10 tahun sebanyak 42 orang (63%), diikuti dengan masa kerja 11-20

tahun sebanyak 24 orang (36%), selanjutnya masa kerja 21-30 tahun yaitu sebanyak 1 orang (1%).

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Frekuensi	Persen
1-10 Tahun	42 orang	63%
11-20 Tahun	24 orang	36%
21-30 Tahun	1 orang	1%
Total	67 orang	100%

Sumber: Data Diolah

Hasil penelitian berdasarkan masa kerja di bidang keuangan (Tabel 5) menunjukkan bahwa bendahara SKPK keseluruhannya memiliki masa kerja 1-10 tahun sebanyak 67 orang (100%).

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja di Bidang Keuangan

Masa Kerja	Frekuensi	Persen
1-10 Tahun	67 orang	100%
Total	67 orang	100%

Sumber: Data Diolah

Hasil penelitian berdasarkan pendidikan (Tabel 6) menunjukkan bahwa bendahara SKPK memiliki jenjang pendidikan yang beragam dengan komposisi terbanyak SMA sebanyak 22 orang (33%), diikuti dengan S1 sebanyak 19 orang (28%), selanjutnya diikuti D3 sebanyak 17 orang (25%), kemudian SMK sebanyak 7 orang (11%) dan komposisi terkecil D1 sebanyak 2 orang (3%).

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Persen
D1	2 orang	3%
D3	17 orang	25%
S1	19 orang	28%
SMA	22 orang	33%
SMK	7 orang	11%
Total	67 orang	100%

Sumber: Data Diolah

Hasil penelitian berdasarkan status perkawinan (Tabel 7) menunjukkan bahwa bendahara SKPK yang telah kawin berjumlah 65 orang (97%) dan belum kawin sejumlah 2 orang (3%).

Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan

Status Perkawinan	Frekuensi	Persen
Belum Kawin	2 orang	3%
Kawin	65 orang	97%
Total	67 orang	100%

Sumber: Data Diolah

Hasil penelitian berdasarkan jumlah pelatihan (Tabel 8) menunjukkan bahwa bendahara SKPK keseluruhannya telah mengikuti pelatihan 1-5 kali sebanyak 67 orang (100%).

Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Pelatihan

Status Perkawinan	Frekuensi	Persen
1-5 kali	67 orang	100%
Total	53 orang	100%

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa SDM, sarana serta prasarana Bendahara, masa jabatan Bendahara, peraturan, intensitas pelatihan manajemen, akuntabilitas Bendahara SKPD, dan ambiguitas perannya dalam Pemerintahan Kabupaten di Aceh Tamiang tunduk terhadap ketepatan pada waktu penyerahan Bendahara mempengaruhi seksualitas. Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah.

**Pengaruh Sumber Daya Manusia Bendahara terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah**

Variabel pegawai keuangan ( $X_1$ ) berpengaruh pada ketepatan dari waktu untuk penyampaian akuntansi pemerintahan

di daerah. Variabel "staf" merupakan unsur yang berperan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban secara akurat. Semakin baik sumber daya manusia suatu daerah, maka semakin tepat waktu dalam penyampaian pelaporan keuangannya. Prihal ini di dukung dengan beberapa riset yang diantaranya oleh Muda (2014), Nilawati (2009) serta Wibowo (2012). Dari penelitian ini didapati bahwasanya variabel sumber daya manusia bendahara ( $X_1$ ) secara parsial tidak signifikan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Kondisi ini disebabkan seringnya mutasi pejabat di pemerintah kabupaten Aceh Tamiang menyebabkan seringnya pergantian bendahara di SKPK, terutama bendahara pengeluaran karena adanya anggapan bahwasanya bendahara merupakan jabatan fungsional kepercayaan dari kepala SKPK selaku pengguna anggaran. Untuk itu direkomendasikan kepada pemerintah daerah setempat untuk tidak terlalu sering memutasikan pejabat khususnya pengelola keuangan di SKPK, bila perlu ditetapkan peraturan Bupati terkait hal ini agar nantinya pengelola keuangan di SKPK bisa memiliki masa jabatan yang cukup lama (bendahara minimal memiliki masa jabatan 2 tahun dan pejabat penatausahaan keuangan minimal memiliki masa jabatan 4 tahun).

#### **Pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah**

Variabel "Sarana serta Prasarana" ( $X_2$ ) berpengaruh pada ketepatan dari waktu untuk penyampaian akuntansi pemerintahan di daerah. Variabel sarana dan prasarana merupakan faktor yang mempengaruhi keakuratan penyampaian laporan pertanggungjawaban. Semakin baik sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah daerah, maka penyampaian laporan pertanggungjawabannya akan semakin ketat. Hal ini di dukung beberapa riset yang diantaranya oleh Muda (2014), Nilawati (2009) serta Wibowo (2012). Dari penelitian ini didapati bahwasanya variabel sarana serta

prasarana ( $X_2$ ) secara parsial tidak begitu signifikan mempengaruhi ketepatan dari waktu untuk penyampaian pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan di daerah. Kondisi ini disebabkan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pekerjaan bendahara di SKPK, contohnya saja laptop. Pada tahun 2014 dilakukan pengadaan laptop hanya untuk operator BMD saja namun untuk bendahara pengeluaran dan penerimaan belum dilakukan. Dari masalah tersebut dapat direkomendasikan kepada pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana untuk bendahara SKPK agar penyampaian laporan pertanggungjawaban lebih tepat waktu.

#### **Pengaruh Masa Kerja Bendahara terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah**

Variabel Masa Bendahara ( $X_3$ ) berpengaruh pada ketepatan dari waktu untuk penyampaian akuntansi pemerintahan di daerah. Variabel waktu kerja merupakan salah satu unsur kunci keberhasilan penyampaian laporan pertanggungjawaban. Semakin lama mereka bertugas, pejabat dan bendahara pemerintah daerah akan semakin terlatih, dan pencatatan akuntansi mereka akan semakin akurat. Hal ini di dukung oleh beberapa riset diantaranya oleh Maksun (2014), Putra (2012), Muda (2014), Nilawati (2009) dan Wibowo (2012). Dari penelitian ini didapati bahwasanya variabel masa kerja bendahara ( $X_3$ ) secara parsial tidak signifikan mempengaruhi ketepatan dari waktu untuk penyampaian pelaporan tanggung jawab pemerintahan di daerah. Kondisi ini sama halnya dengan permasalahan pada variabel sumber daya manusia bendahara ( $X_1$ ). Seringnya pergantian masa jabatan bendahara membuat pemahaman bendahara terhadap bagaimana membuat pertanggungjawaban laporan yang baik menjadi lebih minim sehingga penyampaian laporan pertanggungjawaban kurang tepat waktu.

### **Pengaruh Masa Kerja di Bidang Keuangan Bendahara terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah**

Variabel peraturan ( $X_4$ ) berpengaruh pada ketepatan dari waktu untuk penyampaian akuntansi pemerintahan di daerah. Variabel peraturan merupakan faktor yang mempengaruhi keakuratan penyampaian laporan pertanggungjawaban. Semakin jelas, peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata cara penyampaian laporan pertanggungjawaban dan formatnya tentu akan semakin jelas panduan dan pedoman seorang *officer* dan bendahara pemerintah daerah maka semakin baik dan tepat waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini di dukung oleh beberapa riset diantaranya oleh Maksum (2014) dan Muda (2014). Dari penelitian ini didapati bahwasanya Variabel Peraturan ( $X_4$ ) secara parsial tidak signifikan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Kondisi ini disebabkan kurangnya pemahaman Bendahara SKPK terhadap peraturan yang berlaku. Kurangnya pemahaman ini dikarenakan masa kerja di bidang keuangan yang relatif singkat dari bendahara. Pada dasarnya ada keterkaitan antara variabel SDM bendahara, dengan masa pekerjaan di bidang keuangan bendahara dan peraturan yang berlaku ini, dimana jika seringnya terjadi pergantian bendahara di SKPK otomatis menyebabkan bendahara yang sering berganti ini memiliki masa kerja di bidang keuangan yang relatif singkat, dengan begitu hal ini juga berpengaruh terhadap pemahaman bendahara terhadap peraturan yang ada khususnya peraturan tentang pengelolaan keuangan, tentunya hal ini akan berimbas pada waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban.

### **Pengaruh Intensitas Pelatihan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah**

Perbedaan pelatihan manajemen dan intensitas akuntabilitas akuntan SKPD ( $X_5$ ) berdampak positif pada ketepatan dari waktu penyampaian pelaporan tanggung jawab pemerintahan daerah. Variabel pada intensitas pelatihan dalam penatausahaan merupakan elemen penting untuk menyampaikan laporan keuangan dengan benar. Semakin banyak intensitas pelatihan penatausahaan maka akan semakin mahir seorang *officer* dan bendahara pemerintah dalam penyampaian pelaporan dari keuangan. Prihal ini di dukung beberapa riset yang diantaranya oleh Rahman (2012), Wibowo (2012), Maksum (2014) dan Muda (2014). Dari penelitian ini didapati bahwasanya perbedaan pelatihan pengelolaan dan intensitas akuntabilitas petugas keuangan SKPD ( $X_5$ ) berdampak begitu signifikan pada ketepatan dari waktu untuk penyampaian pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan di daerah. Mulai tahun 2013 sampai dengan sekarang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Aceh Tamiang telah banyak melakukan pelatihan-pelatihan kepada bendahara SKPK terkait pengelolaan keuangan dan aset beserta sosialisasi kebijakan dan peraturan yang mendukung proses ketepatan penyampaian laporan pertanggungjawaban.

### **Pengaruh Ambiguitas Peran terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah**

Variabel ambiguitas peran ( $X_6$ ) berpengaruh pada ketepatan dari waktu untuk penyampaian akuntansi pemerintahan di daerah. Variabel ambiguitas peran berpengaruh terhadap ketepatan waktu pemberian akuntabilitas. Semakin rendah ambiguitas peran yang terjadi maka akan semakin baik *officer* dan bendahara pemerintah dalam penyampaian pelaporan dari keuangan. Prihal ini di dukung beberapa riset yang diantaranya oleh Nilawati (2009) serta Wibowo (2012). Dari penelitian ini didapati bahwasanya ambiguitas peran ( $X_6$ ) signifikan mempengaruhi ketepatan waktu penyerahan rekening kota. Ambiguitas peran

yang dalam hal ini adalah ketidakjelasan peran dari seorang bendahara, khususnya bendahara pengeluaran, dimana terkadang bendahara pengeluaran juga merangkap sebagai pembuat laporan keuangan yang seharusnya adalah tugas dari pejabat penatausahaan keuangan (PPK). Kondisi ini jelas mempengaruhi pekerjaan dari bendahara pengeluaran sehingga bendahara kurang fokus dalam menyelesaikan pertanggungjawaban amprahannya yang pada akhirnya akan membuat bendahara tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawabannya.

#### 4. KESIMPULAN

Sementara itu, faktor SDM, sarana serta prasarana bendahara, masa jabatan bendahara, peraturan, intensitas pelatihan manajemen serta akuntabilitas bendahara SKPD, serta ketidakjelasan peran di pemerintahan kabupaten Aceh Tamiang mempunyai pengaruh yang besar. Dampak ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban laporan pemerintah daerah.

Dalam beberapa kasus, variabel intensitas pelatihan administrasi dan tanggung jawab akuntan SKPD ( $X_5$ ), serta ambiguitas dari peran ( $X_6$ ) menghasilkan dampak yang positif pada ketepatan waktu pelaporan pemerintahan di daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifiansa, L. D., Tausha, S. N. A., & Wibowo, A. P. (2023). Refleksi PERBUP (Peraturan Bupati) Kabupaten Jember atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai Pajak dan Retribusi Daerah dengan Pungutan Liar. *PUSKAPSI Law Review*, 3(2), 177–196. <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v3i2.43821>
- Bandiyono, A., & Andri, S. (2012). Evaluasi Program Pelatihan Bendahara Pengeluaran Pegawai Kementerian Keuangan. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 1(01). <https://tinyurl.com/nha7fpe7>
- Barus, M. P. A. R., Harmain, H., & Tambunan, K. (2023). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Desa Kecamatan Besitang. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(4), 50–73. <https://doi.org/10.55606/makreju.v1i4.2149>
- Damayanti, A. K., & Priono, H. (2023). Analisis Penatausahaan Keuangan Mekanisme Pengeluaran Kas Uang Persediaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(4), 122–132. <https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i4.827>
- Hartati, D. V., Yusrizal, Y., & Bahrin, B. (2021). English Learning Management of Maritim Taruna in Seamanship Education and Training Center of Malahayati Aceh. *Jurnal Pendidikan Progresif*, 11(3), 580–586. DOI: <http://dx.doi.org/10.23960/jpp.v11.i3.2021009>
- Imbing, G. F., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2024). Analisis perbandingan pengelolaan keuangan di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.58784/rapi.73>
- Mahestu, Y., & Tantawi, R. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Organisasi, dan Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial (Studi pada SKPD Kabupaten Aceh Tamiang). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 4(1), 13–23. <https://doi.org/10.33059/jmas.v4i1.6848>
- Maksum, A., Hamid, R., & Muda, I. (2014). The Impact of Treasurer's Experience and Knowledge on the Effectiveness of the Administration and Preparation of the Accountability Reporting System in North Sumatera.

- <https://tinyurl.com/yckerkkh>
- Muda, I. (2014). Analysis on the Timeliness of the Accountability Report by the Treasurer Spending in Task Force Units in Indonesia. <https://tinyurl.com/3s4ennz9>
- Nilawati, I. (2009). Kajian Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008. Retrieved Sept, 20, 2014. <https://tinyurl.com/3dvp7f22>
- Putra, G. P., & Maski, G. (2012). Pengaruh Faktor Pengalaman Kerja, Motivasi Kerja, dan Intensitas Pelatihan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Satuan Kerja di Wilayah Bayar KPPN Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/607/550>
- Rambe, S., Dasopang, E. P., Ariadin, I., & Pahutar, M. (2023). Badan Layanan Umum (BLU) pada Bidang Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 5555–5564. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11958>
- Siagian, A., & Saparuddin, S. (2023). Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidempuan. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), 1620–1631. <https://doi.org/10.36987/ebma.v4i1.4509>
- Siregar, M. (2022). Principal Managerial Competency In Learning Quality Improvement. *JURNAL CURERE*, 6(1), 104–112. DOI: <http://dx.doi.org/10.36764/jc.v6i1.718>
- Siregar, M. M., & Nurbaiti, N. (2023). Analisis Pengaruh Kolaborasi SKPD, Kualitas SDM dan Komitmen Kepemimpinan terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Bidang Aset dan Investasi). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 3939–3948. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.3834>
- Sitorus, M. I. F., Harahap, I., & Harahap, R. D. (2024). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2(1), 181–197. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i1.1087>
- Wibowo, D. P. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Waktu Penyelesaian Rekonsiliasi Data SAI Satuan Kerja (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/544/487>